

**MODEL PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN
ANALISIS DAMPAK GENDER**

(MAKALAH)

Oleh

RIZKY ARMANDA PUTRA	2156041029
ALDO RIZKY WAHYUDI	2156041012
M. IQBAL DANU PRATAMA	2156041025
M. AKBAR SAPUTRA	2156041036
M. GERY GERALDO	2156041037
ADITIA WIRATAMA	2116041092
RENO SETIAWAN	2116041082



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan merupakan proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan untuk menjadi lebih baik hal tersebut sudah ditetapkan Pada peraturan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 2020 mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Indonesia sebagai negara berkembang sangat berkebutuhan pada upaya pembangunan (*development*) pada berbagai sektor kehidupan bernegara yang menjadi kebutuhan primer. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, idak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan dapat juga berarti bentuk. Dalam kata kerja “bangun” juga dapat berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga dapat dikatakan pembangunan meliputi bentuk (*anatomik*), kehidupan (*fisiologis*) dan perilaku (*behavioral*). Lebih dari itu, kata “pembangunan” telah menjadi bahasa dunia (Suryono,2010).

Bray dan White dalam (Suryono,2010) berpendapat bahwa pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya yang meliputi membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik itu individu maupun kelompok, kemudian pembangunan juga harus mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan. Lalu pembangunan juga berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan yang diinginkan dalam yang baik.

Pembangunan dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan (Tikson dalam Digdowiseiso, 2019). Transformasi dalam struktur ekonomi terlihat melalui pertumbuhan produksi di sektor industri dan jasa. Sebaliknya, kontribusi pada sektor pertanian semakin mengecil dan berbanding terbalik. Transformasi dalam sosial dapat dilihat melalui pemerataan terhadap akses sumber daya sosial ekonomi (seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik). Transformasi dalam hal budaya yang sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, terjadinya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat (seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme), pergeseran dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan upaya serta nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun pembangunan tidak selalu merata bagi semua orang, termasuk laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak. Contohnya dibidang pendidikan masih banyak perempuan yang putus sekolah dari pada laki-laki. Alasan pendukung dari kondisi tersebut adalah asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang lebih baik daripada laki-laki, karena kaum perempuan hanya akan bekerja mengurus rumah tangga yang dianggap tidak membutuhkan kecerdasan berpikir (Mandasari, 2022). Ketimpangan gender dapat menyebabkan pembangunan tidak optimal dan dapat mengambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada pembahasan kali ini akan berfokus pada pembangunan dalam lingkup sosial terkhusus pada isu gender.

Diskriminasi gender menjadi masalah bagi masyarakat negara berkembang termasuk indonesia yang masih menganut paham perbedaan kedudukan laki laki dan perempuan. Keadilan sejati berarti lebih dari kesetaraan meluas mengenai kebebasan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan sehingga keadilan dicapai tanpa mengorbankan laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan cenderung menjadi obyek dari diskriminasi gender. Anggapan bahwa laki-laki sebagai sosok yang maskulin dan superior dibanding perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang feminim, kaum lemah dan tidak mampu bersaing. Perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan dirasakan oleh kaum perempuan. Hak perempuan untuk memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam menikmati hasil-hasil pembangunan kerap kali terabaikan (Rahminigrum & Rachmawati 2024).

Isu Gender menjadi penting dalam memproyeksi sebuah pembangunan, hal tersebut dikarenakan semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan dan sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi aktor utama dan sangat penting dalam suatu pembangunan. Kompleksnya permasalahan sosial berkenaan dengan pembangunan dapat bersumber dari ketidakadilan termasuk dalam ketimpangan gender, kemudian jika ditelusuri lebih dalam persoalan tersebut maka pihak perempuanlah yang kerap kali paling banyak dirugikan. Contohnya partisipasi perempuan dalam akses, banyak perempuan yang tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki baik tersebut dalam pengambilan keputusan atau kesempatan pada pendidikan, terlebih pada perempuan pedesaan yang rentan mengalami putus sekolah. Sebab yang mendasar adalah pandangan masyarakat pedesaan yang masih melihat perempuan tidak bisa lepas dari tugas dan fungsi di wilayah domestik, pada praktiknya dipersempit perannya sebagai ibu dan mengurus keluarga, sehingga dianggap tidak perlu pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi dirinya diluar pekerjaan domestik (Taufiq, 2017).

Perubahan cara pandang tentang gender merupakan keniscayaan. Penghentian diskriminasi itu bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan nir-diskriminasi sehingga laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Nugroho, 2008). Analisis dampak gender dilakukan dalam upaya pembangunan, terkhusus pembangunan sosial. Analisis dampak gender merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai dampak pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. ADP dapat membantu memastikan bahwa pembangunan adil dan merata bagi semua orang. Gender dalam pembangunan seharusnya membangun keadilan sosial yang sama, namun perempuan dalam banyak struktur budaya yang patriarki selalu memperoleh posisi dominan

dalam mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Peneliti PSKK UGM dan Komnas HAM pada tahun 2023 dalam kegiatan memperingati hari kependudukan dunia 2023 mengatakan bahwa perempuan belum mendapatkan keadilan dalam hak-haknya di masyarakat, baik itu dalam struktur dan partisipasi sosial maupun dari segi fasilitas.

Perempuan dalam banyak struktur budaya yang patriarki selalu memperoleh posisi dominan dalam mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Masalah tersebut disebabkan oleh beragam hal, salah satunya yang tampak jelas ialah produk politik sosial dan budaya yang terus berkembang di masyarakat dengan konsep yang masih berperspektif laki-laki “patriarki”, hal tersebut kemudian memunculkan beragam bentuk-bentuk ketidakadilan yang pada konteks ini banyak diterima oleh perempuan. Sebagai mana yang digambarkan bahwa bentuk-bentuk peradaban manusia yang menjustifikasi fenomena ketertindasan perempuan itu telah tergambar dalam fragmentasi sejarah di berbagai belahan dunia (Nugroho, 2011).

BAB II

PEMBAHASAN

A. MODEL PEMBANGUNAN

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

1. *Economic Growth* (Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan)

Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan atau bisa disebut juga sebagai model pembangunan tradisional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dan ukuran keberhasilan pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:

- akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM;
- peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.

Namun model pembangunan tradisional atau *Economic Growth* ini banyak dikritik karena dianggap kurang memperhatikan aspek sosial, keadilan, dan kelestarian lingkungan.

2. *Basic Needs* (Model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan)

Model pembangunan ini merupakan salah satu pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan utama pembangunannya khususnya masyarakat miskin. Misalnya dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, air bersih, transportasi dan lain-lain

3. *People Centered* (Model pembangunan yang berpusat pada manusia)

Model pembangunan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia berikut juga perkembangan dan juga kesejahteraannya. Pada proses pembangunan ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang dan aktualisasi potensi manusia untuk menjadi lebih besar. Dalam model pembangunan ini harus tercipta keadilan pembangunan antar gender yakni laki-laki dan perempuan harus

diberdayakan secara adil dan diberikan peluang atau peran secara sama pula agar terciptanya keadilan sosial atau pemerataan dibidang sosial.

Kemudian secara eksplisit pembangunan dijabarkan oleh Siagian dalam (Lestari Dkk, 2021) yang mengatakan bahwa pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam proses pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 1) Sumber daya alam; 2) Sumber daya manusia; 3) Stabilitas politik; 4) Kebijakan pemerintah.

B. Analisis Dampak Gender

1. Gender

Kata gender secara etimologis dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Gender*". Apabila dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender*. Seringkali *gender* disamakan pengertiannya dengan *sex* (jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan). Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak dan perilaku tanggung jawab yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya masyarakat setempat (Utaminingsih, 2017).

Sebagian orang mendefinisikan gender sama dengan jenis kelamin, padahal kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Sementara jenis kelamin adalah hal yang kodrati, yang bersifat mutlak sebagai takdir dari Allah SWT, beserta kemampuan yang melekat didalamnya, seperti kemampuan untuk fisiologis untuk melahirkan, pembawaan gen dan kromosom dan sebagainya yang berkaitan secara biologis (Rahminigrum & Rachmawati 2024). Gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya (Mosse, 2007).

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Gender* adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir, sehingga secara implementasinya di lapangan dapat diubah tergantung dari tempat atau wilayah, waktu, budaya, status sosial, pemahaman religi, ideologi, politik, hukum dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan gender bukanlah kodrat yang diberikan Tuhan yang bersifat permanen melainkan hasil buatan manusia yang dapat dibentuk karena berbagai faktor.

2. Pengarusutamaan Gender

Pengertian pengarusutamaan gender (PUG) dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah. PUG juga merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Tujuan akhir pengarusutamaan gender (PUG) adalah transformasi dari keadaan tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kondisi sosial, menjadi setara bagi keduanya serta terpenuhinya kebutuhan praktis dan strategis gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

3. Analisis Dampak Gender

Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. Dengan demikian analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis gender merupakan kerangka kerja yang dipergunakan untuk mempertimbangkan dampak suatu kegiatan, aktivitas atau program pembangunan yang mungkin terjadi pada laki-laki dan perempuan, serta terhadap hubungan ekonomi sosial terhadap mereka. Analisis gender merupakan sistem analisis terhadap ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban dari ketidakadilan tersebut. Mayoritas yang mengalami ketidakadilan adalah perempuan, maka seolah-olah analisis gender hanya menjadi alat perjuangan kaum perempuan Argyo Damartoto dalam (Puspitawati, 2013).

Analisis gender merupakan alat dan tehnik yang tepat untuk mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencanaan serta para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan

Analisis dampak gender untuk melihat tingkat kesetaraan perempuan dan laki laki menurut sara longwe dalam (Nurhaeni, 2004) diklasifikasikan kedalam lima kategori sebagai berikut:

1) *Welfare* (kesejahteraan)

Yang dimaksud dengan *welfare* (kesejahteraan) adalah tingkat kesejahteraan materi perempuan relatif terhadap laki-laki. Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: apakah perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya seperti pasokan makanan, pendapatan dan, perawatan medis dibandingkan laki-laki?

2) *Access* (Akses)

Yang dimaksud dengan akses adalah adanya peluang perempuan terhadap faktor-faktor produksi atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, yaitu adanya akses yang sama terhadap tanah, tenaga kerja, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, dan semua layanan serta manfaat publik. Longwe menunjukkan bahwa kesetaraan akses

diperoleh dengan menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan, yang biasanya memerlukan reformasi hukum dan praktik administrasi untuk menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

3) *Conscientisation* (Penyadaran)

Yang dimaksud dengan penyadaran adalah adanya pemahaman bahwa peran gender adalah budaya yang dapat diubah. 'Penyadaran' juga melibatkan keyakinan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan disetujui oleh kedua belah pihak, dan tidak melibatkan dominasi ekonomi atau politik dari satu jenis kelamin pada jenis kelamin yang lain. Keyakinan pada kesetaraan seksual adalah dasar dari kesadaran gender dan partisipasi kolektif dalam proses pembangunan perempuan.

4) *Participation* (Partisipasi)

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah adanya partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, maupun administrasi. Partisipasi merupakan aspek yang sangat penting dari proyek pembangunan, di mana partisipasi berarti keterlibatan dalam penilaian kebutuhan, perumusan proyek, implementasi, dan evaluasi. Kesetaraan partisipasi berarti melibatkan perempuan dalam membuat keputusan dimana komunitas mereka akan terpengaruh, dalam proporsi yang sesuai dengan proporsi mereka dalam komunitas yang lebih luas.

5) *Control* (Pengendalian)

Yang dimaksud dengan control adalah kendali perempuan atas proses pengambilan keputusan melalui penyadaran dan mobilisasi, hal ini dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan kendali atas faktor-faktor produksi dan distribusi manfaat. Kesetaraan kontrol berarti keseimbangan kontrol antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi.

C. Penerapan Analisis Dampak Gender di Indonesia

1. Kebijakan Dan Peraturan Terkait Gender di Indonesia

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. pengarusutamaan gender merupakan strategi efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dimana terdapat kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Permen PPPA RI No 4 Tahun 2014).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala

Lembaga nonKementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (good governance) dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Selain itu Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Salah satu substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD, serta tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-SKPD.

Saat ini Pemerintah menyepakati bahwa untuk percepatan pelaksanaan PUG telah ditetapkan Strategi Nasional (Stranas) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA No. SE 46/MPPPA/11/2012. Dalam Stranas tersebut di atas, seluruh K/L dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan melaksanakan PPRG dengan mengacu kepada matrik kesepakatan dalam Stranas.

2. Analisis Dampak Gender Dalam Pembangunan

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan Indonesia, tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Gender pada hakikatnya mencakup laki-laki dan perempuan secara non biologis. Namun, pembahasan tentang gender sangat didominasi pembahasan tentang masalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan.

Analisis dampak gender dalam pembangunan merupakan suatu pendekatan yang penting untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses pembangunan. Analisis dampak gender dalam pembangunan membantu memastikan bahwa program dan proyek pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas, dan kontribusi gender baik itu laki-laki atau perempuan. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan manusia yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

Dalam meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan, Indonesia harus menghadapi banyak sekali tantangan. Masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai masyarakat kelas dua, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Anak laki-laki dipandang lebih baik dan membanggakan dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki lebih diberi kesempatan untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan dibandingkan anak perempuan. Faktor sosial budaya masyarakat dan orang tua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga sering berakibat pada rendahnya kinerja akademik bahkan putus sekolah. Adanya pemikiran bahwa menyekolahkan anak perempuan merupakan investasi yang sia-sia. Selain itu juga rendahnya pendidikan dan

pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan mempengaruhi pada tingkat kesehatan anak, tingginya anak kematian ibu dan bayi disamping sebabkan pula oleh kemiskinan (Probosiwi, 2015).

Pembangunan bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan yang diberikan oleh pemerintah. Gender sangat berdampak pada pembangunan karena Gender baik itu laki-laki maupun perempuan menjadi aktor utama dalam pembangunan. Namun, dewasa ini muncul budaya patriarki yang mana hanya pihak laki-laki lah yang mendominasi baik itu didalam struktur sosial, pekerjaan dan juga keahlian. Tentunya hal tersebut berdampak pada pembangunan, karena pihak perempuan dirasa tidak diberdayakan dan tidak mendapatkan pemerataan pembangunan.

Selaras dengan hal tersebut (Effendi dalam santoso, 2004) melihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dijabarkan dalam tiga perspektif yaitu mutu modal manusia (*human capital*), kemudian perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal, serta perspektif gender.

Perspektif mutu modal manusia (*human capital*) menekankan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan tuntutan pembangunan dan tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi. Tanpa keterlibatan itu sulit bagi kaum perempuan untuk memperbaiki nasib. Pembangunan membuka peluang perempuan untuk bekerja di sektor publik yang pada gilirannya membuka kemungkinan bagi kaum perempuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik dalam upaya mengembangkan diri dan memperbaiki kondisi hidupnya, antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan (Effendi dalam Santoso, 2004).

Perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal menekankan bahwa perempuan adalah aset pembangunan yang belum banyak dimanfaatkan, sehingga selama ini terjadi inefisiensi dalam pembangunan. Atas dasar inilah kaum perempuan perlu dimanfaatkan secara penuh dengan melibatkan mereka melalui ekspansi industri kapitalis negara maju ke negara berkembang. Hal tersebut membuka peluang keterlibatan kaum perempuan di pasar kerja untuk mendapatkan upah. Dengan demikian mereka dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi (Effendi dalam Santoso, 2004).

Perspektif gender menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berakar pada ideologi gender. Ideologi gender ini bersumber dari konstruksi sosial masyarakat, bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka peran mereka juga harus berbeda. Perbedaan ini telah disosialisasikan sejak lahir dan akhirnya melahirkan ketidakadilan yang mengejawantah dalam berbagai perilaku kehidupan bermasyarakat. Jadi menurut perspektif ini, penyebab kesenjangan bukan terletak pada ketidakmampuan perempuan seperti perspektif *human capital* tetapi lebih disebabkan ideologi, sistem, struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender. Manifestasi ideologi ini tercermin dalam strategi, rencana, kebijakan dan program pembangunan (Effendi dalam Santoso, 2004).

Kemudian Analisis dampak gender dalam pembangunan yang dilakukan adalah untuk melihat tingkat kesetaraan perempuan dan laki laki menggunakan model (longwe dalam Nurhaeni, 2004) diklasifikasikan kedalam lima kategori sebagai berikut:

a) *Welfare* (kesejahteraan)

welfare (kesejahteraan) adalah tingkat kesejahteraan materi perempuan terhadap laki-laki. Laki-laki lebih unggul dalam hal tingkat kesejahteraan materi. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur sosial normalnya laki-laki menjadi kepala keluarga yang mendominasi dalam sektor pekerjaan, sedangkan perempuan selalu dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak dirumah. Ini mengakibatkan perempuan tidak dapat peluang untuk mencari materi secara mandiri karena tuntutan dari struktur sosial tersebut. Perempuan selalu disibukan dengan urusan rumah seperti memasak, bersih-bersih, mengurus anak dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut menyebabkan kesejahteraan materi laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan. Sehingga tidak adanya kesamaan akses sumber daya yang dimiliki perempuan dibandingkan laki-laki. Dari hal kesenjangan antara laki-laki dan perempuan ini dapat menyebabkan kemiskinan ekonomi yang lebih didominasi perempuan.

b) *Access* (Akses)

akses adalah adanya peluang perempuan terhadap faktor-faktor produksi atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, yaitu adanya akses yang sama terhadap tanah, tenaga kerja, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, dan semua layanan serta manfaat publik. Kesetaraan akses yang diperoleh laki-laki dan perempuan bisa tercapai dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan kesempatan. Namun dewasa ini, hal tersebut sulit tercapai karena budaya yang sudah mengakar di negara berkembang seperti indonesia yaitu budaya patriarki dimana pihak laki-laki selalu mendominasi dibandingkan perempuan. Perempuan dianggap sebagai pihak yang tidak perlu terlalu diberdayakan karena akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Terutama dalam hal pelatihan kerja, tenaga kerja. Kemudian juga kredit, karena syarat pengajuan kredit haruslah memiliki penghasilan. Atas dasar hal-hal tersebut perempuan sulit mendapat kesetaraan akses.

c) *Conscientisation* (Penyadaran)

Yang dimaksud dengan penyadaran adalah adanya pemahaman bahwa peran gender adalah budaya yang dapat diubah. 'Penyadaran' juga melibatkan keyakinan bahwa pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin harus adil dan disetujui oleh kedua belah pihak, dan tidak melibatkan dominasi ekonomi atau politik dari satu jenis kelamin pada jenis kelamin yang lain. Keyakinan pada kesetaraan seksual adalah dasar dari kesadaran gender dan partisipasi kolektif dalam proses pembangunan perempuan.

Namun, penyadaran ini tidak dapat terjadi karena peran gender sebagai budaya yang harus diubah namun sulit untuk diubah. Pembagian kerja selama ini masih banyak didominasi oleh laki-laki karena dianggap sebagai yang paling tinggi dan memimpin dalam struktur sosial. Kemudian dominasi ekonomi juga masih

dipimpin oleh pihak laki-laki karena atas dasar hal diatas yang menyebabkan perempuan menjadi minoritas dalam sektor ekonomi.

d) *Participation* (Partisipasi)

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah adanya partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, maupun administrasi. Partisipasi merupakan aspek yang sangat penting dari proyek pembangunan, di mana partisipasi berarti keterlibatan dalam penilaian kebutuhan, perumusan proyek, implementasi, dan evaluasi. Kesetaraan partisipasi berarti melibatkan perempuan dalam membuat keputusan dimana komunitas mereka akan terpengaruh, dalam proporsi yang sesuai dengan proporsi mereka dalam komunitas yang lebih luas.

Kesetaraan partisipasi ini sulit diwujudkan karena sampai saat ini hal tersebut masih didominasi oleh laki-laki, pihak perempuan dirugikan karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan masih menjadi objek yang mengikuti dan mematuhi keputusan yang didominasi oleh laki-laki

e) *Control* (Pengendalian)

Yang dimaksud dengan control adalah kendali perempuan atas proses pengambilan keputusan melalui penyadaran dan mobilisasi, Kesetaraan kontrol berarti keseimbangan kontrol antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi. Dalam struktur sosial yang ada dinegara berkembang, perempuan selalu tidak dilibatkan dalam aspek pengendalian seperti pengambilan keputusan sehingga tidak terciptanya keseimbangan kontrol antara laki-laki dan perempuan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

pembangunan merupakan upaya serta nawa-cita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun pembangunan tidak selalu merata bagi semua orang, termasuk laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasi salah satu pihak. Diskriminasi gender menjadi masalah bagi masyarakat negara berkembang termasuk Indonesia yang masih menganut paham perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Hak perempuan untuk memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam menikmati hasil-hasil pembangunan kerap kali terabaikan. Isu Gender menjadi penting dalam memproyeksi sebuah pembangunan, hal tersebut dikarenakan semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan dan sub-pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi aktor utama dan sangat penting dalam suatu pembangunan.

Analisis dampak gender dalam pembangunan merupakan suatu pendekatan yang penting untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam proses pembangunan. Analisis dampak gender dalam pembangunan membantu memastikan bahwa program dan proyek pembangunan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas, dan kontribusi gender baik itu laki-laki atau perempuan. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan manusia yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya perempuan masih dikesampingkan dalam hal kedudukan, serta pemberdayaan.

B. Saran

1. Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Dalam struktur sosial harusnya budaya patriarki dihapuskan, karena kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan harus diwujudkan agar terciptanya kesetaraan dan tidak adanya ketimpangan. Dalam hal ini harus adanya kesetaraan mengenai akses yang didapatkan kemudian lapangan pekerjaan yang ada juga harus adil dan tidak hanya didominasi oleh pihak laki-laki. Perempuan juga harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, formulasi kebijakan dan juga evaluasi. Dominasi dalam struktur sosial terhadap laki-laki juga harus dihapuskan karena tidak melulu perempuan harus menjadi ibu rumah tangga dan harus memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki. Agar terciptanya keadilan dalam pembangunan. Pemberdayaan dan pelatihan terhadap perempuan juga harus dilakukan dengan serius oleh pemerintah. Karena dengan hal tersebut dapat membuka peluang pada perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki dan lebih berdaya.

REFERENSI

Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

<https://ugm.ac.id/id/berita/peneliti-pskk-ugm-dan-komnas-ham-ungkap-perempuan-belum-mendapat-keadilan-dalam-hak-haknya-di-masyarakat/>

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 (9/2000) Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad. (2003). „*Mengapa Industri Manufaktur Tetap Berkelompok Secara Spasial di Pulau Jawa?*“, Gadjah Mada International Journal of Business, Vol. 5 (2) 221-247

Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). *Teori Pembangunan Ekonomi*. REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 2(2), 113-128.

Mandasari, N. (2022). *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi)*. Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal), 2(2), 50-59.

Mosse. (2007), *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nugroho, Riant. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nugroho, Riant. 2011. *Gender Dan Strategi PengarusUtamaanya Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Ed II

Nurhaeni, I. D. A. (2004). *Analisis Gender Model Sara Longwe*. Jurnal Ilmiah Perempuan dan Gender, 2(1), 1-14.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah.

Probosiwi, R. (2015). *Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development)*. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, 3(1), 41-56.

Puspitawati, H. (2013). *Konsep, teori dan analisis gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.

- Rahminigrum, A., & Rachmawati, I. (2024). *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Sukabumi*. JPM MOCCI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan, 2(1), 47-55.
- Santoso, B. (2004). *Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*. Jember: Universitas Jember.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Taufiq, M. N. (2017). *Pembangunan Berbasis Gender Mainstreaming (Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch Di Gresik)*. Paradigma, 5(3).
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.